

ABSTRAK

MUH. FABILAH (30301408616), dengan judul skripsi “**Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Saksi Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi**” (Studi Putusan Perkara Nomor : 90/Pid-TPK/2017/PN.Smg) Dibimbing oleh Bapak R. SUGIHARTO, S.H.,M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana formil terhadap bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi dalam tindak pidana korupsi Serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan Perkara Nomor : 90/Pid-TPK /2017/PN Smg.

Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian untuk mendapatkan saran - saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder.

Pertimbangan hakim menilai kekuatan alat bukti saksi dalam Tindak Pidana Korupsi yang menyebabkan kerugian perekonomian Negara pada putusan Pengadilan Nomor : 90/Pid-TPK /2017/PN Smg, adalah sah karena telah terpenuhinya syarat formil dan syarat materiilnya sebagai alat bukti saksi, Serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan Perkara Nomor : 90/Pid-TPK /2017/PN Smg. dalam membuktikan kesalahan terdakwa yaitu dengan terpenuhinya batas minimum pembuktian menurut Pasal 183 KUHP yaitu sekurang - kurangnya dengan dua alat bukti yang sah berupa saksi dan keterangan ahli. Penjatuhan pidana 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa hanya untuk mempertanggungjawabkan secara yuridis atas Tindak Pidana Korupsi.

Kata kunci : Pembuktian, keterangan saksi, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

MUH. FABILAH (30301408616), with the thesis title "**Strength of the Proof of Witness's Proof of Information in the Corruption Examination**" (Study of Decision Case Number: 90 / Pid-TPK / 2017 / PN.Smg) Supervised by Mr. R. SUGIHARTO, SH, .MH

This study aims to determine the application of formal criminal law to how the evidence strengthens evidence evidence of witnesses in corruption cases and how judges consider examining cases of corruption in the Decision Case Number: 90 / Pid-TPK / 2017 / PN Smg.

To achieve these objectives the author uses a normative juridical approach, the specification of this study uses descriptive research specifications, namely a study to get suggestions on what to do to overcome a particular problem, the data source used in this study is a secondary data source.

Judges consider the strength of the witness evidence in the Corruption Crime that causes the State's economic losses in the Court's decision Number: 90 / TPK / 2017 / PN Smg, it is legal because the formal conditions and material requirements have been fulfilled as witness evidence. judge in examining cases of corruption in the Decision Case Number: 90 / Pid-TPK / 2017 / PN Smg. in proving the defendant's mistake by fulfilling the minimum limit of proof according to Article 183 of the Criminal Procedure Code that is at least with two valid evidences in the form of witnesses and expert statements. Penalty of 1 (one) year and 2 (two) months and a fine of Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah) to the defendant only to be legally accountable for the Corruption Act.

Keywords: Proof, witness statement, Corruption Crime.